BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keluarga adalah tempat utama dan pertama bagi manusia untuk berkembang. Kegagalannya berfungsi memberikan pengaruh-pengaruh negatif bagi manusia dan menjadi penyebab dari berbagai masalah (kesehatan, psikis, dan sosial) di masa manusia itu tumbuh dewasa. Keluarga disfungsional merupakan masalah yang serius mengingat sesungguhnya masalah sosial disebabkan oleh keberadaan orang-orang (dewasa/orang tua) yang tidak sehat jiwanya dalam keluarga, yang karenanya gagal menjalankan fungsi pemeliharaan, perlindungan dan pembimbing bagi anak-anaknya. Tasmin dalam Mahpur (2011) menyatakan keluarga disfungsional pun memediasi munculnya beragam masalah sosial di masyarakat, contohnya kriminalitas, anak terlantar, remaja bermasalah perilaku, dan sebagainya.

Parillo dalam Indrawati (2014) menyebutkan keluarga disfungsional mengacu pada pola keluarga yang secara umum diasosiasikan dengan rendahnya tingkat kesehatan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan pengaruh-pengaruh positif jika dibandingkan dengan keluarga-keluarga lainnya, dicirikan di antaranya dengan adanya: *Pertama*, adanya kekerasan emosional, fisik, atau seksual dan penelantaran dalam rumah tangga dari orang tua terhadap anak (*child abuse*) atau kekerasan antar pasangan (*spouse abuse*). Penelantaran dan kekerasan dalam keluarga dapat melukai jiwa dan fisik anak. *Kedua*, adanya penyalahgunaan narkoba dan alkohol yang kronis. Penggunaan narkoba dan alkohol berdampak pada tingginya kekerasan dalam keluarga dan rendahnya kualitas hubungan orang tua anak. *Ketiga*, adanya

kondisi-kondisi tertentu yang menjadikan anggota keluarga (orang tua) sulit memenuhi tanggung jawabnya terhadap anak, seperti kemiskinan dan dapat menimbulkan pola pengasuhan anak yang buruk dari orang tua (*toxic parents*).

Keluarga disfungsional termasuk masalah sosial karena dua hal, yaitu dampak negatif yang dimunculkannya: *Pertama*, keluarga yang disfungsional mengakibatkan anggota di dalamnya mengalami penderitaan, kesakitan, dan kesulitan lantaran karakteristik dasar keluarga yang buruk. *Kedua*, keluarga yang disfungsional menurunkan pola-pola kehidupan yang juga disfungsional kepada anak cucu keturunannya selanjutnya lewat proses yang dinamakan transmisi intergenerasi. Tanpa adanya kekuatan pribadi untuk menjalani kehidupan yang baik dan dukungan sosial (dari luar keluarga), lingkaran setan keluarga disfungsional ini akan bertahan dari masa ke masa, diturunkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya (Forward, 1998).

Benton dalam Indrawati (2014) menyebutkan bahwa keluarga disfungsional merupakan kondisi apa saja yang mengganggu keberfungsian yang sehat dari suatu keluarga. Setiap keluarga pasti pernah mengalami kondisi yang sulit, apakah itu penyakit, kematian atau masalah. Membedakan mengenai apakah itu keluarga yang sehat atau tidak adalah dengan cara mereka merespon masalah. Keluarga yang sehat kembali berfungsi normal setelah krisis berlalu, masalah dalam keluarga disfungsional cenderung menjadi kronis sehingga anak-anak tidak mendapatkan pemeliharaan dan kebutuhan yang seharusnya.

Pengasuhan yang buruk dalam keluarga dapat melahirkan anak-anak yang terlantar. Pengertian anak terlantar dalam pasal 1 angka 7 undang-undang No. 4

tahun 1979 tentang kesejahteraan anak menyebutkan bahwa anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Demikian keterlantaran mengandung pengertian tiadanya pengasuhan yang baik agar anak berkembang secara wajar baik fisik, mental, maupun sosial dan pada akhirnya mampu untuk mandiri.

Melihat pengertian tentang anak terlantar tersebut, maka anak terlantar mempunyai ciri utama tiadanya perawatan dan pengasuhan yang baik dan putus sekolah. Tiadanya pengasuhan yang baik, pendidikan yang memadai menyebabkan terbatasnya pemenuhan kebutuhan fisik, mental, dan sosial sehingga anak tidak memperoleh kesempatan mengembangkan dirinya agar mampu mandiri.

Salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan anak terlantar melalui UU RI No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menegaskan bahwa untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial, negara menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan; maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah beserta perangkat daerahnya memerlukan dukungan peran masyarakat yang seluas-luasnya. Masyarakat yang dimaksud pasal 38 UU No. 11 tahun 2011 tersebut adalah Lembaga Kesejahteraan Sosial seperti Yayasan Panti Asuhan.

Panti asuhan kenyataannya bukan untuk anak-anak yang membutuhkan pengasuhan alternatif, tetapi untuk anak-anak miskin yang ditempatkan oleh

keluarga mereka agar mereka bisa mengakses pendidikan. Sistem pengasuhan dan perlindungan saat ini fokusnya tidak memastikan keluarga mampu mengasuh anak secara layak. Lebih dari 90% anak di panti asuhan masih memiliki orang tua. (Damayanti, I., & Rihhandini, D. O. 2021).

Salah satu lembaga yang memiliki perhatian terhadap permasalahan anak adalah Yayasan Bhakti Pertiwi Kabupaten Bandung. Pendirian panti asuhan pada hakikatnya merupakan upaya untuk membantu pengasuhan anak dari keluarga yang tidak mampu atau ditinggal oleh salah satu atau kedua orang tuanya. Dilihat dari definisinya menurut Musdalifah (2007) panti asuhan adalah lembaga untuk mengasuh anak-anak, menjaga dan memberikan bimbingan kepada anak dengan tujuan agar mereka dapat menjadi manusia dewasa yang cakap dan berguna serta bertanggung jawab atas dirinya dan terhadap masyarakat kelak di kemudian hari. Panti asuhan dapat pula dikatakan atau berfungsi sebagai pengganti keluarga dan pimpinan panti asuhan sebagai pengganti orang tua, sehubungan dengan orang tua anak tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya dalam mendidik dan mengasuh anaknya.

Banyak anak yang tinggal di LKSA belum sepenuhnya dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi layanan pengasuhan yang diterima oleh anak asuh itu sendiri. Konvensi hak anak (KHA) diratifikasi di Indonesia, menegaskan bahwa anak memiliki hak untuk berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan mereka, termasuk dalam sistem pengasuhan alternatif. Minimnya partisipasi anak dapat disebabkan juga oleh beberapa faktor, seperti pola pengasuhan yang masih bersifat *top-down*, kurangnya kesadaran pengelola LKSA

tentang pentingnya keterlibatan anak, serta keterbatasan mekanisme yang memungkinkan anak untuk menyuarakan pendapatnya. Hal ini dapat menimbulkan resiko ketidakpuasan anak terhadap sistem pengasuhan yang diterapkan, serta berdampak pada kesejahteraan psikososial mereka.

Penelitian partisipasi anak terdahulu yang dilakukan, di antaranya : Lawado, I. S., & Na'imah, N. I. (2018) berjudul *"Strategi Pemberdayaan Anak melalui Wadah Partisipasi Anak Sebagai Upaya Pemajuan Hak Asasi Manusia"* menyoroti pentingnya partisipasi anak sebagai salah satu hak dasar yang harus dipenuhi oleh negara, masyarakat, dan keluarga. Penelitian ini berangkat dari fenomena rendahnya keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan mereka, akibat minimnya ruang, kesempatan dan waktu yang diberikan oleh orang dewasa untuk mendengar suara anak.

Penelitian Hastira, M. F. (2024) berjudul *"Peran ASEAN Children's Forum dalam Mendorong Pemenuhan Hak Partisipasi Anak di Indonesia"* membahas proses internalisasi norma hak partisipasi anak di Indonesia melalui peran *ASEAN Children's Forum* (ACF). ACF merupakan satu-satunya forum Asia Tenggara yang melibatkan anak-anak secara langsung dalam diskusi mengenai hak dan perlindungan anak, sehingga memiliki potensi memengaruhi kebijakan di tingkat nasional dan regional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan wawancara yang menunjukkan bahwa norma partisipasi anak di Indonesia telah mencapai tahap internalisasi dalam siklus *Norms Lif Cycle*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun ACF berkontribusi pada peningkatan kesadaran dan keterlibatan anak, faktor internal seperti kebijakan pemerintah, peran Forum

Anak Nasional, dan dukungan keluarga lebih dominan dalam mendorong keberhasilan pemenuhan hak partisipasi anak di Indonesia.

Penelitian Whardani., et, al. (2024) berjudul *"Analisis Tingkat Partisipasi Anak untuk Pembangunan Kota Berkelanjutan di Kampung Pelangi"* mengkaji tingkat partisipasi anak di Kampung Pelangi, Semarang, terkait dalam pembangunan kora berkelanjutan. Analasis partisipasi didasarkan pada model Tangga Partisipasi Anak oleh Roger Hart (1992), yang membagi tingkat partisipasi ke dalam delapan tahapan, mulai dari manipulasi hingga inisiasi kegiatan oleh anak. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa tingkat partisipasi anak berada pada tahap ke-3 (tekonisme), di mana anak-anak telah dibimbing untuk berpendapat, tetapi mereka cenderung terbatas pada aktivitas yang diinisiasi oleh orang dewasa.

Pengamatan awal penelitian di Yayasan Bhakti Pertiwi Kabupaten Bandung, partisipasi anak dalam pengasuhan masih belum berjalan secara optimal. Anak-anak masih menerima keputusan dari pengelola panti tanpa dilibatkan dalam perencanaan atau evaluasi aktivitas keseharian mereka. Seperti dalam penentuan jadwal kegiatan, aturan asrama, hingga pengambilan keputusan terkait pendidikan dan kebutuhan pribadi anak. Kondisi ini menunjukkan masih kuatnya pola pengasuhan *top-down* yang tidak sejalan dengan prinsip partisipasi.

Berdasarkan kajian terhadap penelitian terdahulu, partisipasi anak masih terdapat dalam konteks makro, seperti pemenuhan hak partisipasi dalam kebijakan nasional dan regional, atau partisipasi anak dalam pembangunan komunitas, yang secara substansi berbeda dari pengasuhan anak di lingkungan lembaga formal. Penelitian menempatkan partisipasi anak dalam konteks Lembaga Kesejahteraan

Sosial Anak (LKSA), khususnya panti asuhan, masih jarang dilakukan. Penelitian yang secara komprehensif mengkaji bentuk-bentuk partisipasi anak dalam keanekaragaman, keterlibatan, kemandirian, kesenangan, serta kepuasan anak terhadap layanan pengasuhan belum ditemukan. Berdasarkan pengalaman peneliti, maka penulis tertarik mengambil judul, "Partisipasi Anak di Yayasan Bhakti Pertiwi Kabupaten Bandung".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti membuat rumusan masalah yaitu "Bagaimana partisipasi anak di Yayasan Bhakti Pertiwi Kabupaten Bandung?" rumusan masalah tersebut diperinci menjadi sub rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keanekaragaman aktivitas yang dilakukan anak dalam pengasuhan di Yayasan Bhakti Pertiwi?
2. Bagaimana keterlibatan anak dalam aktivitas pengasuhan di Yayasan Bhakti Pertiwi?
3. Bagaimana kemandirian anak dalam mengikuti aktivitas pengasuhan di Yayasan Bhakti Pertiwi?
4. Bagaimana kesenangan yang dirasakan anak dalam berbagai aktivitas yang mereka lakukan di Yayasan Bhakti Pertiwi?
5. Bagaimana kepuasan anak terhadap aktivitas yang mereka ikuti dalam pengasuhan di Yayasan Bhakti Pertiwi?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran tentang partisipasi anak di Yayasan Bhakti Pertiwi Kabupaten Bandung. Adapun

tujuan khusus pada penelitian ini diantaranya:

1. Menganalisis dan mengetahui keanekaragaman aktivitas yang dilakukan anak dalam pengasuhan di Yayasan Bhakti Pertiwi Kabupaten Bandung.
2. Menganalisis dan mengetahui frekuensi keterlibatan anak dalam berbagai aktivitas pengasuhan di Yayasan Bhakti Pertiwi Kabupaten Bandung.
3. Menganalisis dan mengetahui tingkat kemandirian anak dalam mengikuti aktivitas pengasuhan di Yayasan Bhakti Pertiwi Kabupaten Bandung.
4. Menganalisis dan mengetahui tingkat kesenangan yang dirasakan anak dalam berbagai aktivitas di Yayasan Bhakti Pertiwi Kabupaten Bandung.
5. Menganalisis dan mengetahui tingkat kepuasan anak terhadap aktivitas yang mereka ikuti dalam pengasuhan di Yayasan Bhakti Pertiwi Kabupaten Bandung.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya kajian akademik mengenai partisipasi anak di lingkungan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), khususnya dalam aspek panti asuhan. Kajian ini menambahkan literatur tentang keterlibatan anak dalam kehidupan sehari-hari di lembaga pengasuhan, meliputi bentuk partisipasi, keanekaragaman, keterlibatan, kemandirian, kesenangan, serta kepuasan anak terhadap pengasuhan. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji lebih dalam mengenai hak anak dalam sistem pengasuhan alternatif. Penelitian ini, diharapkan wawasan

mengenai pengasuhan berbasis hak anak semakin berkembang dan dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan yang lebih baik di masa depan.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Bagi Yayasan Bhakti Pertiwi, hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana standar pengasuhan anak telah diterapkan, terutama dalam mendorong anak untuk menyampaikan pendapat dan terlibat dalam pengambilan keputusan. Bagi anak yang tinggal di LKSA, penelitian ini mendorong kesadaran mereka akan hak untuk berpendapat dan terlibat dalam keputusan yang menyangkut kehidupan mereka. Bagi pemerintah dan pembuat kebijakan, hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif. Bagi pekerja sosial dan pengasuhan di LKSA, penelitian ini dapat membantu meningkatkan pemahaman tentang pentingnya mendukung suara dan pilihan anak, serta mendorong penerapan pendekatan pengasuhan yang lebih partisipatif.

1.5. Sistematika penulisan

Sistematika yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah akhir ini sebagai berikut:

BAB I **PENDAHULUAN,** Terdiri atas pembahasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II **KAJIAN KONSEPTUAL,** Tinjauan mengenai penelitian terdahulu dan teori yang relevan dengan penelitian, terdiri atas pembahasan tentang partisipasi anak, anak, dan pekerja sosial

dengan anak.

BAB III **METODE PENELITIAN,** memuat mengenai desain penelitian, penjelasan istilah, latar penelitian, sumber data dan cara menentukan data, pemeriksaan keabsahan data, teknik analisis data serta jadwal dan langkah-langkah penelitian.

BAB IV **HASIL DAN PEMBAHASAN,** memuat mengenai gambaran lokasi penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan (analisa hasil penelitian, analisa masalah, analisa kebutuhan dan analisa sumber).

BAB V **USULAN PROGRAM,** terdapat dasar pemikiran, nama program, tujuan program, sasaran program, sistem pelaksanaan, metode dan teknik, rencana anggaran biaya, analisis kelayakan dan indikator keberhasilan.

BAB VI **SIMPUL DAN SARAN,** memuat mengenai simpulan dan saran yang diajukan kepada pihak-pihak yang berkaitan.